

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM)  
DI DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN (2018-2020)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

**Kafiya Sitta Salma**  
NIM. 1705026046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
S1 EKONOMI ISLAM  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Kafiya Sitta Salma

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Kafiya Sitta Salma  
Nim : 1705026046  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing I



**H. Ade Yusuf Mujaddid. M.Ag.**  
NIP. 19670119199803



**Singgih Muheramtohad,**  
**S.Sos.I, MEI**  
NIP. 19821031201531003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM

Jl Prof DR HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

PENGESAHAN

Nama : Kafiya Sitta Salma  
NIM : 1705026046  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : "Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah  
Kabupaten Demak Tahun 2018-2020".

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 15 September 2022 dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup serta dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 15 September 2022

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Septiana Na'afi, M.Si.

NIP. 19890924 201903 2 018

Sekretaris Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.

NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji II

Zaidan Adv Fataron, S.T., M.M.

NIP. 19840308 201503 1 001



Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing II

Singih Muherachudi, S.Sos.I., M.E.I.

NIP. 19821031 201503 1 003

## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ فَالِإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَاعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Kamu semua adalah pemimpin, kamu semua ditanya tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin, dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dari rumah suaminya ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi kamu semua adalah pemimpin, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. (HR. Bukhari).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtar al-Hadits an-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, h. 119.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan anugerah kepada saya dengan memberikan kelancaran dalam pengerjaan skripsi saya. Karya ini kupersembahkan untuk;

1. Kedua orang tuaku, bapak Fachrurrozi dan Ibu Wahyuni serta semua kakak-kakak saya yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan dalam semua hal. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungannya, yang tidak mungkin dapat kubalas. Hanya dengan menulis pada selembarnya yang bertuliskan kata terima kasih di halaman persembahan ini.
2. Dosen pembimbing saya, Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtahadi, S.Sos.I., M.E.I. sebagai dosen pembimbing II. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membimbing saya hingga pengerjaan skripsi selesai.

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021  
Deklator



**Kafiya Sitta Salma**  
NIM. 1705026046

## ABSTRAK

Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai desa dengan tipologi desa persawahan memiliki keterbatasan dalam modal bercocok tanam dan hasil yang tidak seimbang, sedangkan ketika masyarakat ingin beralih menjadi pedagang dan pengusaha kecil mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan modal, oleh karena itu peran pemerintah Desa melalui program PNPM Mandiri dengan kegiatan pinjaman bergulir diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?; dan 2) Apa Saja Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yaitu dokumen dan wawancara dengan pemerintahan desa, pengelola PNPM Mandiri dan masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan PNPM mandiri dan pemberdayaan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pertama dengan ikut terlibat dalam perencanaan dengan memilih salah satu anggota pemerintah desa untuk menjadi ketua dalam program dan mengarahkan pimpinan PNPM untuk bekerja berdasarkan tugas pokok PNPM Mandiri, kedua pemerintah berperan dalam merealisasikan pelaksanaan dengan mengadakan kerjasama, memberikan motivasi agar pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut, ketiga merealisasikan pengawasan atau Evaluasi PNPM Mandiri di dengan mengontrol kerja PNPM dan memberikan bimbingan kepada pengurus PNPM karena pada dasarnya pengawasannya langsung melekat kepada ketua kelompok. *Kedua*, Faktor penghambat pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yaitu 1) Terbatasnya dana dari pemerintah; 2) Pengembalian pinjaman yang kurang lancar; 3) Pelatihan berkala menurunkan antusias dan semangat masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa, Merealisasikan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

## ABSTRACT

Gajah Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency, as a village with a rice field typology, has limitations in farming capital and unbalanced yields, while when people want to turn into traders and small entrepreneurs, they have difficulty getting capital, therefore the role of the village government through the PNPM Mandiri program with rotating lending activities are expected to be able to overcome this. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the village government in realizing PNPM independently in Gajah Village, Gajah District, Demak Regency?; 2) What are the Inhibiting Factors of the Village Government in Realizing PNPM Mandiri in Gajah Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency?.

This type of research is *field research* with a qualitative approach with primary data sources, namely documents and interviews with village government, PNPM Mandiri managers and the people of Gajah Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency and secondary data sources in the form of books, journals and related articles. with independent PNPM, and community. Data were collected through observation, interviews and documentation. The data collected was then analyzed using descriptive qualitative.

The results showed: *first*, the role of the village government in realizing PNPM independently in Gajah Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency, first by being involved in planning by choosing a member of the village government to become the chairman of the program and directing PNPM leaders to work based on the main tasks of PNPM Mandiri, the two governments play a role in realizing implementation by cooperating, providing motivation so that loans can be rolled out to the community, coordinating, and helping if problems occur in the group, thirdly realizing PNPM Mandiri supervision or evaluation by controlling PNPM work and providing guidance to PNPM management because basically the supervision is directly attached to the group leader. *Second*, the inhibiting factors of the village government in realizing PNPM Mandiri in Gajah Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency, is 1) Limited funds from the government; 2) Substandard loan repayments; 3) Periodic training reduces the enthusiasm and enthusiasm of the community.

**Keywords:** Role of Village Government, Realize, National Program for Independent Community Empowerment



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku ketua Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
4. Nurudin,. S.E, MM, sekretaris Prodi Ekonomi Islam terhadap bimbingannya.
5. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, M.E.I. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 16 Desember 2021  
Penulis



**Kafiya Sitta Salma**  
NIM. 1705026046

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian .....	15

### **BAB II PNPM MANDIRI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA**

A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri .....	18
1. Pengertian Desa .....	18
2. Pemerintah Desa .....	20
3. Kepala Desa .....	24
4. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ....	25
5. Dasar Hukum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	

Mandiri .....	27
6. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat .....	29
7. Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat .....	30
8. Jenis-Jenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ....	31
9. Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.....	32
10. Prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.....	33
11. Jenis Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.....	35
12. Peran Pemerintah Desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri .....	35
B. Faktor Penghambat dalam merealisasikan PNPM Mandiri.....	38

**BAB III PNPM MANDIRI DI DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

A. Gambaran Umum Desa Gajah Kec Gajah Kab Demak.....	40
B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .....	41
C. Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .....	44
D. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .....	63

**BAB IV ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEREALISASIKAN PNPM MANDIRI DI DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

A. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	68
1. Perencanaan Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten	

Demak.....	71
2. Pelaksanaan Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	74
3. Pengawasan Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	75
B. Analisis Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kec Gajah Kab Demak.....	75
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka .....	81
Lampiran .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Peta Desa Gajah .....	40
---------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Nama Pejabat Administrasi Desa Gajah .....	42
Tabel 3.2 Nama ketua dan anggota PNPM Desa Gajah .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada September 2020 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 27,55 juta jiwa. Pembangunan yang harusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata yang sudah berjalan pada saat ini secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Sehingga, menimbulkan berbagai macam masalah yaitu pengangguran dan kemiskinan.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus pemerintah yaitu upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang sejak dahulu hingga sekarang menjadi masalah yang belum terselesaikan dan tentunya butuh perhatian lebih dari pemerintah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yaitu memberdayakan masyarakat. Komunitas di pedesaan harus mampu mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, mengenali potensi-potensi yang ada dalam konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup. Masyarakat dituntut dalam keikutsertaan dalam pembangunan secara aktif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil pembangunan. Tanpa adanya kontribusi dari masyarakat,

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Jakarta: BBPS, 2016



pembangunan hanya akan menimbulkan ketergantungan yang menjadi objek dalam proses pembangunan.<sup>3</sup>

PNPK-MPd Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) atau Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan program pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan dengan keterpaduan dan kelanjutan.<sup>4</sup>

PNPM Mandiri dibuat untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan yang seluruhnya dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mengentas kemiskinan masyarakat terutama keluarga miskin dan pengangguran yang didukung banyak kalangan atau yang berkepentingan dalam bidangnya.<sup>5</sup>

Pengangguran di Indonesia khususnya di Desa semakin lama semakin tinggi khususnya bagi masyarakat umur kerja, seperti terjadi di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan penduduk 8.227 jiwa dan jumlah kepala keluarga 2.601, di mana tingkat pengangguran banyak terjadi pada usia anak lulus Sekolah Menengah Atas atau sederajat, bahkan kebanyakan tanggung jawab pencarian nafkah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah istri yang bekerja di pabrik sebagai pencari nafkah utama keluarga dan suami bertugas untuk mengantar dan menjemput istri dari pabrik,

---

<sup>3</sup> Rahayu Kristiniati dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 2, September 2014, h. 103-220

<sup>4</sup> Jima, Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 14, No. 2, 2013, h. 99

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 99

Hal ini dikarenakan kesempatan seorang suami yang kurang diterima di dunia industri dan akhirnya menjadi pengangguran. Fenomena tersebut sudah menjadi sesuatu yang normal di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, ketidakmampuan maupun kesempatan seorang suami atau anak lulusan SMA dalam bekerja menjadi salah satu faktor utama pengangguran ini terjadi.

Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai desa yang mempunyai tipologi desa persawahan dengan luas 853,0000 Ha dengan komunitas unggulan-unggulan padi, palawija dan semangka masih belum bisa mengangkat derajat masyarakat dari garis kemiskinan, hal ini dikarenakan modal bercocok tanam tidak seimbang penjualan dari hasil penjualan tanaman tersebut, masyarakat kecil yang mempunyai keinginan menjadi pedagang dan pengusaha mendapat kendala berupa mendapatkan modal dan mengalami kesulitan dari hasil barang dagangannya, itulah mengapa masih banyak keluarga miskin di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Pengangguran yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak juga bisa dikatakan sebagai sebuah budaya kemiskinan. Faktor budaya merupakan sangat berpengaruh pada sikap seseorang yang tidak mau memperbaiki tingkat kemiskinan meski ada usaha dari pihak luar atau pihak dalam yang mau untuk membantunya. Adat istiadat yang dianut masyarakat dengan cara berpikir yang kurang rasional, sifat pemalas dan

kebiasaan masyarakat yang cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai membuat masyarakat jatuh kepada kemiskinan.<sup>6</sup>

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri sebagai program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan menyikapi fenomena pengangguran yang banyak terjadi Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak melalui pemberdayaan yang bernama tridaya mempunyai tiga kegiatan pokok yaitu ekonomi, sosial dan infrastruktur.

Khusus di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak program infrastruktur memanfaatkan sumber daya warga yang dilakukan melalui program padat karya desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, bantuan bedah rumah, penyuluhan, pelatihan dan kesehatan merupakan program sosial dilakukan di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sedangkan program ekonomi dilaksanakan dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, yaitu pengajuan pinjaman kepada masyarakat miskin dalam skala mikro di wilayah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk memulai usaha, masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan hidupnya dengan diberi pinjaman dengan pendampingan berkala dan suku bunga yang rendah sehingga ada penghasilan dan ruang untuk mendapatkan menambah penghasilan.

PNPM Mandiri Perdesaan sekarang berjalan di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan kegiatan “Pinjaman Bergulir” kelompok usaha diberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, namun dari 16

---

<sup>6</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bine Reka Pariwara, 2012, h. 56

kelompok yang mengikuti program ini hanya ada 6 kelompok atau 37,5% yang mampu melunasi pinjaman modal tersebut, sedangkan 10 kelompok 62,5% tidak mampu melunasi dengan berbagai masalah diantaranya tidak dimanfaatkannya modal tersebut untuk usaha produktif oleh anggota kelompok, kredit macet karena mengalami kerugian usaha, persaingan usaha yang tidak sehat sehingga keuntungan yang diperoleh dalam usaha tidak maksimal, penggunaan modal usaha yang digunakan untuk kegiatan bertani dan kegiatan konsumtif lainnya dengan penghasilan tidak menentu menjadikan tidak mampu secara rutin membayar melunasinya.<sup>7</sup>

PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada awal-awal pelaksanaannya kurang sekali melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan. Pihak yang terlibat dalam merencanakan program adalah perangkat desa dan panitia pelaksana, sehingga masyarakat merasa terpaksa dalam melaksanakan program dan hanya dimobilisasi oleh aparat desa, satu-satunya alasan masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ikut serta dalam program PNPM mandiri adalah rasa malu antar sesama masyarakat jika tidak berpartisipasi. Lemahnya sasaran pemberdayaan bagi masyarakat miskin di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menjadi salah satu sebab tidak tepatnya sasaran khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pembangunan.

---

<sup>7</sup> Wawancara pra riset dengan Kepala Desa, pengurus PNPM Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Keseimbangan bisa tercapai jika pemerintah bertanggungjawab penuh menjamin kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara kaya dan miskin suatu masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu kendala tercapainya tujuan tersebut.<sup>8</sup>

Berbagai macam permasalahan tersebut menjadikan program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di masyarakat ini belum dapat berjalan secara maksimal. Dari permasalahan di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “peran pemerintah Desa dalam merealisasikan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kec Gajah Kab Demak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kec Gajah Kab Demak.

---

<sup>8</sup> Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora, 2005, h. 170

#### **D. Manfaat Penelitian**

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta pengetahuan tentang peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

#### **E. Tjauan Pustaka**

Peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan diatas, antara lain:

1. Penelitian Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Riyanto (2019) dengan judul “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”. PNPM MP Di Desa

Bendungan Kecamatan Gondang dilaksanakan secara sistematis dibagi dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap pelaksanaan dan ketiga, yang terakhir ialah tahap/proses pelestarian. Hambatan yang dihadapi PNPM MP di Desa Bendungan diantaranya yaitu pemahaman terhadap PNPM MP.<sup>9</sup>

Penelitian Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Riyanto mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu PNPM MP, namun penelitian ini hanya mengkaji tentang PNPM MP secara umum sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang peran pemerintah desa dalam PNPM MP di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan arahnya pada pemberdayaan masyarakat, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Kurniati Moohi, dkk. (2017) yang berjudul “Peran Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata”. hasilnya pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sangat besar terhadap Masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melibatkan masyarakat dengan tujuan dapat

---

<sup>9</sup> Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Riyanto “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, 2019

menambah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian Widya Kurniati Moohi, dkk. mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu PNPM, namun penelitian diatas hanya mengkajii tentang peran masyarakat PNPM secara umum sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang peran pemerintah desa dalam PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan arahnya pada pemberdayaan masyarakat, sehingga ada perbedaan dengan penelitian skripsi peneliti.

3. Penelitian Usman Matdoan (2015) “Peranan Program PNPM-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan sejak penerapannya telah menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat lokal untuk secara proaktif terlibat secara kolektif dalam berbagai pembangunan, masyarakat setempat diberi penguatan kapasitas dalam berbagai model dan pendekatan yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai tokoh utama pembangunan, konseptualisasi, perencanaan, penerapan dan refleksi hasil-hasil pembangunan tidak lagi bersifat sektoral dan top down, akan tetapi lebih bersifat partisip dan bottom up.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Widya Kurniati Mohi, Rusdin Djibu, dan Yena Dunggio, “Peran Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2017.

<sup>11</sup> Usman Matdoan “Peranan Program PNPM-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal”, *Jurnal Biology Science & Education* Vol. 4 No. 1 edisi Jan-Jun 2015



Penelitian Usman Matdoan memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yaitu PNPM, namun penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat PNPM secara umum sedangkan penelitian yang dikaji peneliti membahas tentang peran pemerintah desa dalam PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan arahnya pada pemberdayaan masyarakat, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu “pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki”.<sup>12</sup> Dalam hal ini adalah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni penelitian yang berupaya memperoleh data, mengolah dan menganalisisnya serta ditafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat dan/atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebenarnya atau

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h.10

sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.<sup>13</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk mencoba, memahami dan menggambarkan keadaan subyek yang diteliti dengan mendetail dan mendalam terutama yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

#### a Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dokumen dan data wawancara dengan Kepala Desa, Ketua LKMD, Ketua PNPM, Ketua Kelompok kegiatan PNPM, dan Masyarakat yang menjadi anggota PNPM terkait peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

#### b Sumber Data Sekunder

Penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan PNPM mandiri dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, h. 174

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. *Observasi*

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan melakukan pencatatan secara sistematis merupakan bagian penting dalam metode observasi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non participant observer*, yakni peneliti dalam penelitiannya tidak turut aktif setiap hari berada di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dari observasi akan menjelaskan peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

##### b. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan interview dengan responden.<sup>15</sup> Wawancara bebas terpimpin merupakan bentuk wawancara yang digunakan peneliti, dengan memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

*Interview* ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari data-data yang ada kaitannya dengan segala sesuatu tentang peran

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2004, h. 45

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, h. 132

pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Obyek yang diwawancarai dalam penelitian ini, adalah Kepala Desa, Ketua LKMD, Ketua PNPM, Ketua Kelompok kegiatan PNPM, dan Masyarakat yang menjadi anggota PNPM terkait peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

#### c. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda yang mempunyai unsur tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui data-data yang ingin diketahui oleh peneliti maka metode dokumentasi ini digunakan mengetahui dokumen-dokumen yang terkait dengan gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dokumen PNPM Mandiri, dan dokumen-dokumen lainnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dianalisis berdasarkan fakta yang ditemukan dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 135

lapangan, tanpa harus menguji hipotesis maupun implikasi, sehingga analisis ini bersifat deskriptif.<sup>17</sup> Analisis ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.<sup>18</sup>

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kumpulan data-data yang sudah didapatkan dari hasil Interview, observasi dan dokumentasi di lapangan yang sebagai bahan yang nantinya dikaji lebih jauh lagi dalam penelitian ini. Dalam konteks ini, peneliti mencatat hasil wawancara dari Kepala Desa, ketua PNPM Mandiri dan masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

b. Reduksi Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian direduksi dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam penelitian dengan memilih dan memilah setiap data yang diperoleh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasarkan pada kesesuaian yang dikaji atau diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 6-7.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 147

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 92

c. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan data tersebut sesuai dengan sub bagian masing-masing, seperti deskripsi data tentang perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengartikan data yang telah di display untuk dicari kesesuaiannya dengan teori yang ada, sehingga ditemukan data temuan baru tentang peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## **G. Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis mengemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematik penulisan skripsi.

**BAB II** Bab ini memiliki tiga sub bahasan. *Pertama*, PNPM mandiri yang terdiri dari pengertian desa, pemerintah desa, kepala desa, pengertian PNPM mandiri, dasar hukum PNPM Mandiri, tujuan

PNPM mandiri, visi dan misi PNPm mandiri, Jenis-jenis PNPm mandiri, peran PNPm mandiri, prinsip-prinsip PNPm mandiri, jenis kegiatan PNPm mandiri, peran pemerintah desa dalam PNPm mandiri. *Kedua*, faktor penghambat dalam merealisasikan PNPm mandiri.

BAB III bab ini menggambarkan PNPm mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan faktor penghambatnya. Dalam bab ini mempunyai empat sub bab bahasan. *Pertama*, gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Kedua*, gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Ketiga*, peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPm mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Keempat*, faktor penghambat pemerintah desa dalam merealisasikan PNPm mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

BAB IV Dalam bab ini berisikan tentang *Pertama*, analisis Peran Pemerintah Desa dalam merealisasikan PNPm di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang terdiri dari 1) perencanaan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPm di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; 2) pelaksanaan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPm di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; dan 3) pengawasan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPm di Desa Gajah

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Kedua*, Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam merealisasikan PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

**BAB V** Bab ini memuat kesimpulan penelitian sebagai penegasan jawaban atas masalah-masalah yang diangkat dan asumsi-asumsi yang pernah dikatakan sebelumnya, kemudian diteruskan dengan saran-saran.



## BAB II

### PNPM MANDIRI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

#### A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

##### 1. Pengertian Desa

Secara etimologi desa berasal dari Bahasa sanskerta yang memiliki arti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Sedangkan secara terminologi desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Menurut R. Bintarto menyatakan bahwa desa suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan yang dimaksud disini ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.<sup>20</sup> Pendapat lain mengungkapkan bahwa menurut N.Daldjoeni Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduk yang bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam<sup>21</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

---

<sup>20</sup> R.Bintarto, Desa Kota, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6

<sup>21</sup> N.Daldjoeni, Interaksi Desa – Kota, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4.

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>22</sup>. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)<sup>23</sup> . Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>24</sup>.

Jadi dapat disimpulkan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki beberapa wewenang diantaranya yaitu:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>25</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa desa memiliki wewenang diantaranya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan terkait urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## **2. Pemerintah Desa**

Pada UU Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Indonesia<sup>26</sup>. Menurut Nur Cholis, Pemerintah Desa memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten<sup>27</sup>

Pemerintah Desa yang dimaksud ialah Kepala Desa dimana sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa yang mana dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD)
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

---

<sup>26</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

<sup>27</sup> Nurcholis, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 22

- j)Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- k) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- l)Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- m)Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- n) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- o) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- p) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan
- q) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- r) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- s) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- t)Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- u) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- v) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat
- w)Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- x) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selanjutnya perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa tercantum pada pasal 48 yang terdiri atas :<sup>28</sup>

1. Sekretariat desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis

---

<sup>28</sup> Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dimana sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa yang mana dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa memiliki wewenang seperti yang telah di jelaskan di atas.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsi dengan camat atas nama Bupati /Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas- tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah ada lima fungsi utama pemerintah yaitu<sup>29</sup> :

1. Fungsi pengaturan atau regulasi
2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat
3. Fungsi pemberdayaan masyarakat
4. Fungsi pengelolaan aset / kekayaan
5. Fungsi pengamanan dan perlindungan

### **3. Kepala Desa**

Tugas kepala desa berdasarkan pada pasal 26 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa merupakan menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pengertian kepala desa sendiri yaitu seseorang yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 127 tentang tugas pokok kepala desa sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

---

<sup>29</sup> Asnawi Rewansyah, Akutansi Desa Teori dan Praktek, (Malang : SC IRDH, 2011), hlm. 18.

Dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki tugas pokok sebagaimana telah di atur di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 127.

#### **4. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri**

Tahun 2007 merupakan awal mula berdirinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan komponen besarnya yang bernama PNPM Mandiri Perdesaan, yang dicetuskan pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan, dan PNPM Perkotaan yang lahir pada tahun 1999 dengan nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang semuanya kini sudah berkembang pesat.<sup>30</sup>

Pada tahun 1997 di dunia mengalami krisis ekonomi yang berimbas kepada bangsa Indonesia dan berdampak kepada krisis Multi dimensi. Saat itu peningkatan penduduk miskin sangat signifikan menjadi 24,2% pada tahun 1998. Dari sebab itu pemerintah terus mengadakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai metode, mulai dari bantuan jangka pendek, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Metode ni telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi hanya 11,3% pada tahun 2013.<sup>31</sup>

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan

---

<sup>30</sup> Triyono, Bambang, dkk, *Evaluasi PNPM Mandiri*, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas, 2013, h. iii

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. iii



perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin yang bertujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.<sup>32</sup>

PNPM mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satu program utama pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

PNPM bukan program yang sama sekali baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, dua program diintegrasikan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. iii

di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan, dan selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan mendapat PNPM.

## **5. Dasar Hukum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

Dasar hukum PNPM mandiri berdasarkan pada UUD 1945 beserta amandemennya mendasar pada idiil Pancasila, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM mandiri yang akan disusun. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, keuangan negara sebagai berikut:

### **1. Sistem Pemerintahan**

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

### **2. Sistem Perencanaan**

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

### 3. Dasar Keuangan

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

- f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **6. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan PNPM Mandiri adalah untuk menyejahterakan dan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, sedangkan tujuan khususnya sebagai berikut:

- a. Kelompok miskin diberi partisipasi lebih atas peningkatan dan pembangunan.
- b. Masyarakat dan pemda mengembangkan pengentasan kemiskinan
- c. Berbagai stakeholder antara membangun sinergi untuk pengentasan kemiskinan
- d. Memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan bertujuan untuk memperkuat sosial kapital.<sup>33</sup>

Jadi Tujuan PNPM Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat miskin di perdesaan memiliki kesempatan kerja di perdesaan dengan pengelolaan pembangunan dan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang mandiri tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 27

mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di rencanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari untuk dan oleh masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif

## **7. Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

### 1) Visi PNPM Mandiri

Visi PNPM Mandiri yaitu kemandirian masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan miskin di daerah perdesaan.<sup>34</sup>

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berarti kesejahteraan. Yang disebut dengan Kemandirian yaitu mampu mengorganisasikan diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada di luar lingkungannya, serta mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

### 2) Misi PNPM Mandiri

- a. Kapasitas masyarakat dan kelembagaannya harus ditingkatkan
- b. Sistem pembangunan partisipatif dalam kelembagaan
- c. Fungsi dan peran pemerintah lokal harus optimal.
- d. Sarana dan prasarana masyarakat ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas.
- e. Jaringan kemitraan di kembangkan dalam pembangunan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta, 2008, h. 3

## 8. Jenis-Jenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

### Mandiri

PNPM Mandiri merupakan bagian program untuk pencapaian *Millennium Development Goals* atau MDGs. Karena itu, dalam kurun waktu PNPM Mandiri pada tahun 2015 dilaksanakan setidaknya sesuai target pencapaian MDGs. Anggaran yang diperlukan sampai tahun 2009 sebesar 20,1 triliun rupiah dimana tahun 2007 besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap kecamatan antara milyar/kecamatan/tahun. Pembiayaan program berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swadaya masyarakat.<sup>36</sup>

#### a. Program PNPM bidang sosial

##### 1) Pengembangan masyarakat

Komponen pada pengembangan masyarakat diantaranya untuk membangun kesadaran kritis, masalah dan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan sumber daya dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Pendukung yang digunakan dalam rangkaian tersebut yaitu dengan menyediakan dana untuk kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi serta fasilitator.

##### 2) Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal

Komponen pada peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal yaitu sehubungan dengan kegiatan untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Bambang Triyono dkk., *Evaluasi PNPM Mandiri, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*, Bappenas, 2013, h. 24

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku local peduli supaya dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan positif bagi masyarakat terutama pada masyarakat menengah ke bawah dalam menjalankan kehidupan secara layak.. pendukung yang digunakan dalam rangkaian tersebut diantara mengadakan seminar, pelatihan, lokakarya dan kunjungan lapangan.

b. Program PNPM bidang ekonomi

1) Bantuan langsung masyarakat

Komponen pada bantuan langsung masyarakat yaitu dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada masyarakat guna membiayai beberapa kegiatan yang akan dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

2) Bantuan pengelolaan dan pengembangan program

Komponen pada bantuan pengelolaan dan pengembangan program diantaranya kegiatan yang mendukung pemerintah dan kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti pengendalian mutu, pengembangan program, konsultan manajemen dan evaluasi.<sup>37</sup>

## **9. Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri**

Kelompok program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta prosedur dan program mekanisme, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk inovasi masyarakat mendorong dan prakarsa dalam upaya

---

<sup>37</sup> Keputusan Kemenko Kesra selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tentang pedoman umum pnpm mandiri, hal 26-27.

menanggulangi kemiskinan yang berkelanjutan. Pada dasarnya PNPM Mandiri berperan secara terbuka bagi semua kegiatan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan yang diusulkan dan disepakati oleh masyarakat, meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata ke pemerintahan yang baik.<sup>38</sup>

#### **10. Prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri**

Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri yakni:

- a. Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 2



- b. Otonomi Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara sukarela
- c. Desentralisasi Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
- d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- e. Partisipasi / Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- f. Kesenjangan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
- h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif

- i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas
- j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini.<sup>39</sup>

## **11. Jenis Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri**

PNPM Mandiri memiliki kegiatan diantaranya: pertama kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya perbaikan sarana prasarana dasar yang menyangkut kebutuhan pokok ekonomi masyarakat, kedua kegiatan yang mengarah pada program kesehatan dan pendidikan, ketiga peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat yang didasarkan pada usaha lokal dan keempat pemberian modal usaha pada kelompok perempuan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 17-18

<sup>40</sup> Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta, 2008, h. 5

## **12. Peran Pemerintah Desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri**

PNPM mandiri merupakan salah satu program nasional yang konsisten terhadap pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang sanggup mengelola potensi dan sumber yang ada di sekitarnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penyesuaian yang dilakukan oleh PNPM sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan penyediaan kesempatan kerja serta untuk memperoleh pendapatan yang dikhususkan kepada masyarakat yang tidak terampil dan pengangguran. Usaha kecil mikro menjadi sektor yang menjanjikan untuk menjalankan wirausaha. Sektor swasta dianggap memberi kontribusi kepada penyerapan tenaga kerja untuk, menjalankan usaha mikro dan kecil serta masyarakat dituntut untuk menjalankan wirausaha sendiri.<sup>41</sup>

Dalam proses perjalanannya PNPM Mandiri membutuhkan peran pemerintah desa. Peran pemerintah desa adalah mengadakan kerja sama, memberikan motivasi agar pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut, selain itu pemerintah desa juga dituntut untuk bisa merealisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi kerja PNPM Mandiri. Aprilita (2013) mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan

---

<sup>41</sup> Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, dan I Dewa Gede Suthapa. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjan UGM, 2010, hlm. 51.

PNPM Mandiri Pedesaan membutuhkan peran pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen yaitu perencanaan. Tanpa adanya perencanaan, tujuan yang diinginkan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan segala sesuatu secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

*Pertama*, umumnya peran pemerintah Desa dalam merealisasikan perencanaan PNPM Mandiri diserahkan semua kepada ketua PNPM dan kelompoknya yang pada dasarnya pemerintah desa mengarahkan untuk diaplikasikan oleh UPK khususnya program pinjaman sesuai pada pedoman teknis mengenai pengelolaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

*Kedua*, peran pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan program PNPM memiliki tujuan agar tersedianya akses pelayanan terutama dalam hal keuangan pada setiap masyarakat dengan pola pinjaman bergulir mikro berbasis pasar kepada rumah tangga miskin agar nantinya keluarga miskin tersebut dapat memperbaiki keadaan perekonomiannya dan mampu memberikan pembelajaran bagi keluarga miskin tersebut agar dapat memanfaatkan secara maksimal setiap pinjaman yang diperoleh secara produktif dan tepat guna.

*Ketiga*, peran pemerintah desa Merealisasikan pengawasan atau Evaluasi PNPM Mandiri dilakukan dengan mengontrol kerja PNPM dan

---

<sup>42</sup> Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Suatu Pendekatan Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, h. 4

memberikan bimbingan kepada pengurus PNPM karena pada dasarnya pengawasannya langsung melekat kepada ketua kelompok.

## **B. Faktor Penghambat dalam Merealisasikan PNPM Mandiri**

Di dalam setiap kegiatan yang sedang berlangsung tentu akan hambatan-hambatan yang muncul. Begitu juga dalam realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri ditemui beberapa hambatan. yaitu:

### **a. Terbatasnya dana dari pemerintah**

Terbatasnya bantuan dari pemerintah mengakibatkan banyak masyarakat yang berminat ikut sebagai peserta dan penerima bantuan harus menunggu giliran. Selanjutnya, terkait dengan kesiapan anggaran dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan harus didukung pula dengan kesiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan pelaksanaan termasuk di dalamnya sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

### **b. Pengembalian peminjaman**

Dalam hal pengembalian peminjaman juga mengalami kendala yang cukup serius yakni ada beberapa peminjam yang kurang lancar dalam proses angsuran pengembaliannya. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa pinjaman tersebut merupakan dana hibah atau dana tersebut dirasa sebuah uang yang diberikan secara cuma-cuma tanpa ada proses pengembalian, dan ada juga yang lari dari tanggung jawabnya karena tidak mau membayar ataupun mengembalikan pinjaman tersebut. Namun,

sebagian besar masyarakat tetap ada yang sadar dan membayarnya agar dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang belum mendapatkannya.<sup>43</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam realisasi PNPM ditemui beberapa kendala, diantaranya batuan berupa dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pemberdayaan desa jumlahnya terbatas, jadi masyarakat yang tergabung dalam program tersebut harus bersabar menunggu giliran dari tangan ke tangan. Kendala berikutnya yakni pengembalian pinjaman, dalam hal ini masyarakat yang telah berkesempatan mendapat pinjaman ada yang sadar untuk mrngembalikannya yang nantinya di gulirkan ke yang lainnya, namun ada yang menganggapnya sebagai hibah yang tidak perlu dikembalikan dan ada pula yang lari dari tanggung jawab.

---

<sup>43</sup> Siti Kholijah, Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Program Naional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Skripsi*, hal 63-64

### BAB III

## PNPM MANDIRI DI DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

### A. Gambaran Umum Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Desa Gajah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 283 Ha dengan batasan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sedo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sari, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngaluran dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boyolali. Desa gajah ini terdiri dari dua puluh empat (24) Rukun tetangga (RT) dan lima (5) Rukun warga (RW), dengan penghasilan untuk warga adalah tanaman padi.<sup>44</sup>



Gambar 4.1 peta Desa Gajah

Desa Gajah dikelola oleh beberapa pejabat pemerintah desa diantaranya digambarkan dalam tabel 3.1 berikut:

<sup>44</sup> Dokumen Profil Desa Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

**Tabel 3.1**  
**Nama Pejabat Wilayah Administrasi Desa Gajah**

No	Nama	Jabatan
1	Masrukhin	Kepala Desa
2	Drs. Munjahid	Sekretaris Desa
4	Fitri Rusydiana Tsani	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Sutowo	Kaur Perencanaan
6	Jazuli Iksan	Kaur Keuangan
7	Rahmat Mulyono	Kasi Pemerintahan
8	Muhammad Jazuli	Kasi Pelayanan
9	Shinta Sari Dewi	Kasi Kesejahteraan
10	Kenang Suyanto	Kadus Karang Rejo
11	Eko Supargiono	Kadus Karang Kedempel
12	Siti Sundari	Kadus Karang Mulyo

**B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. PNPM mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan PNPM Desa Gajah seperti halnya tujuan PNPM secara nasional yaitu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan



masyarakat miskin di perdesaan memiliki kesempatan kerja di perdesaan dengan pengelolaan pembangunan dan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di rencanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari untuk dan oleh masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Visi dan misi PNPM Mandiri Desa Gaja sama seperti visi dan misi PNPM Mandiri nasional. Visinya yaitu kemandirian masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan miskin di daerah perdesaan dan misinya adalah 1) Kapasitas masyarakat dan kelembagaannya harus ditingkatkan; 2) Sistem pembangunan partisipatif dalam kelembagaan; 3) Fungsi dan peran pemerintah lokal harus optimal; 4) Sarana dan prasarana masyarakat ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas; 5) Jaringan kemitraan di kembangkan dalam pembangunan.

PNPM mandiri Desa Gajah merupakan salah satu program nasional yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat baik terkait dengan sarana fisik atau pengembangan usaha, oleh karena itu peran pemerintah Desa sangat diperlukan dalam program tersebut yang mana harus mampu menjadi perencana, pelopor maupun pengawas kegiatan tersebut meskipun sumber informasi hanya di dapatkan dari ketu dan laporan-laporan anggota lainnya.

Ada banyak sekali masyarakat yang bergabung dalam kegiatan PNPM ini tentu peran ketua PNPM juga sangat dibutuhkan. Berikut ini nama kelompok masyarakat yang tergabung dalam kegiatan PNPM sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Nama Ketua dan Anggota PNPM Desa Gajah**

Nama	Jabatan
Sundari	Ketua PNPM
Rohimah	Ketua Kelompok kegiatan PNPM
Abadi Rahman	Anggota PNPM
Astuti	Anggota PNPM
Muhammad Adib sutomo	Anggota PNPM
Ahmad Akhyar	Anggota PNPM
Siska Yulyana	Anggota PNPM
Dewi Anjarwati	Anggota PNPM
Muhammad Khidhir	Anggota PNPM
Sri Handayani	Anggota PNPM
Budi Yuliardi	Anggota PNPM
Kandar	Anggota PNPM
Hartati Riyati	Anggota PNPM
Ahmad Amar	Anggota PNPM

### **C. Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

PNPM Mandiri di Desa Gajah Demak bertujuan PNPM untuk membantu masyarakat miskin, khususnya untuk membantu orang-orang yang mempunyai umkm yang bertujuan agar dapat mengembangkan usahanya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha akan terbantu dan usahanya bisa berkembang.

Secara umum PNPM mandiri di Desa Gajah Demak ditangani sendiri oleh ketua program tersebut, sedangkan peran pemerintah desa adalah mengadakan kerja sama, memberikan motivasi agar pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut.

Peran pemerintah desa untuk merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Demak dilakukan dengan tiga tahapan diantaranya:

#### **1. Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan Perencanaan**

Perencanaan kegiatan PNPM yaitu rencana pemerintah yang digunakan untuk merealisasi rancangan yang telah disusun. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Desa dilakukan perencanaan dengan berpegang pada:

- a. Mengidentifikasi dan menentukan jenis-jenis kebutuhan masyarakat
- b. Mengidentifikasi program karya yang dikembangkan masyarakat
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat
- d. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- e. Membantu perekonomian masyarakat
- f. Membuat penilaian yang disesuaikan program kerja yang telah dilakukan

Lebih lanjut Masrukhin selaku kepala desa mengungkapkan:

Peran pemerintah desa memilih salah satu anggota pemerintah desa untuk menjadi ketua dalam program tersebut, kemudian ketua turun ke masyarakat mengadakan pertemuan tingkat RW untuk merekrut masyarakat yang mau ikut serta dalam program tersebut. Pemerintah Desa Juga memberikan kepercayaan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk mengelola salah satu program dalam pencapaian tujuannya. LKM adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan “Pinjaman” kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dalam pengelolaannya pemerintah membuat suatu program yang menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan “Pinjaman jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten.<sup>45</sup>

PNPM Mandiri di Desa Gajah Demak adalah program pemerintah yang berjalan dalam menanggulangi kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat miskin. Untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan Tridaya atau tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang berfungsi memberdayakan masyarakat. Pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin merupakan kegiatan ekonomi yang diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bagi pengembangan usaha masyarakat, yaitu di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Masrukhin selaku kepala desa

Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam perencanaan kredit usaha di tingkat desa mulai dari perencanaan, pembentukan kelompok, pelaksanaan, pencarian dana bahkan yang membuat aturan dan sanksi juga masyarakat itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Sundari selaku ketua PNPM:

Awal mula pengurus PNPM membuat perkumpulan tingkat RW, kelompok tersebut diberi nama Lestari, kemudian mendata masyarakat yang mau ikut serta dengan program tersebut bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Peran ketua dalam perencanaan, pertama diadakan kumpulan hanya se-RW, program dapat berjalan lancar, kemudian yang mengikuti program tersebut se-desa (yang memiliki usaha).<sup>46</sup>

Dengan adanya kegiatan review, diharapkan program kerja PNPM Mandiri mengontrol gerak masyarakat secara sadar, menyesuaikan sumber daya manusia, diantara anggota dan pengelola harus saling menjaga proses pertanggungjawaban pengurus PNPM kepada semua pihak yang bersangkutan serta memilih cara dan menjaga kinerja untuk menanggulangi kemiskinan terutama masyarakat miskin. Menurut Muhammad Jazuli selaku Ketua LKMD:

Perencanaan PNPM Mandiri tidak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

<sup>47</sup> Wawancara dengan Muhammad Jazuli selaku ketua LKMD

Review Kegiatan merupakan rangkaian program yang ditinjau kembali terhadap seluruh rangkaian program yang harus dilakukan khususnya program jangka menengah untuk mencapai kebutuhan dan kesempurnaan sesuai dimasyarakat. Secara umum proses mereview program jangka panjang, menengah, dan pendek di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang pertama dengan melakukan sosialisasi terhadap PNPM tentang mereview partisipatif baik review kelembagaan, keuangan maupun perencanaan program pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Menurut Muhammad Jazuli selaku Ketua LKMD menjelaskan:

Kegiatan review program Khususnya di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak di mulai dengan dibentuknya tim review pada pengurus PNPM yang dilakukan penguatan sebelumnya terhadap tim tersebut tentang proses yang akan dilakukan.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, Muhammad Jazuli selaku Ketua LKMD menyatakan:

Tim review akan bertugas untuk mengadakan penggalian usulan ditingkat basis baik RT maupun RW yang kemudian dilakukan rekapitulasi tentang usulan yang ada. Setelah semua telah direkap dan ditabulasi kedalam format yang ada kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk menyepakati program usulan baik mengenai program, perkiraan biaya dan kapan program tersebut akan dilaksanakan, dan hal ini jelas telah melalui proses skoring untuk menentukan skala prioritas usulan program.<sup>49</sup>

Reorientasi dilakukan sebagai program dalam menggali usulan tingkat dasar untuk mengupdate data kartu keluarga miskin serta reorientasi program dan renta yang telah disusun dan sebelumnya

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Muhammad Jazuli selaku ketua LKMD

<sup>49</sup> Wawancara dengan Muhammad Jazuli selaku ketua LKMD

dilaksanakan. Reorientasi ini ditujukan untuk melakukan kajian ulang tentang kartu keluarga miskin yang sudah ada data maupun belum masuk ke dalam data, serta mengkaji ulang data tersebut tentang program mana yang belum dan sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dari proses yang telah dilakukan kemudian maka didapatkan hasil review yang kemudian dibandingkan dengan program Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk mencapai kesepakatan bersama agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dan sesuai dengan apa yang kebutuhan masyarakat. Dari hasil yang didapatkan di lapangan selanjutnya dilakukan loka karya di tingkat desa untuk menyepakatkan bersama tentang hasil review dan selanjutnya disahkan bersama DPD, Kepala desa dan LKMD yang akan menjadi acuan pembangunan bagi Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya demi mencapai kemandirian bagi masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Lebih lanjut Sundari selaku Ketua PNMP Mandiri menyatakan:

Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasarkan pada pedoman teknis yang mengenai bagaimana mengelola program khususnya pinjaman bagi pengembangan ekonomi masyarakat di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai kriteria pengelola dan penerima pinjaman, Skim pinjaman, tahapan pemberian pinjaman, pembukuan pinjaman bergulir, monitoring pinjaman, penyelesaian pinjaman yang bermasalah serta pelaporan pinjaman dengan bunga kecil.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

Aturan pokok yang diatur dalam pedoman teknis yang direncanakan dalam program PNPM Mandiri untuk masyarakat melalui pinjaman sebagai berikut:

a. Kelayakan kelompok usaha

Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan syarat kriteria kelayakan yang disebutkan berupa kelayakan usaha kelompoknya. Sebelum memulai pinjaman dalam kelompok usaha di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yang harus dilakukan yaitu pengujian kelayakan, baik untuk kelompok maupun untuk anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan pinjaman dapat dilaksanakan, hanya jika para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan. Unit Pengelola Keuangan (UPK) bertanggungjawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan.

b. Pengurus PNPM dengan adanya persetujuan dari masyarakat telah membuat beberapa aturan dasar pinjaman yang memuat kriteria anggotanya yang boleh menerima pinjaman atau tidak, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu melakukan pinjaman dan bagaimana sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota.

Sundari selaku ketua PNPM Mandiri menyatakan:

Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok beserta anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria



kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman dari UPK.<sup>51</sup>

Hanya anggota dan kelompok yang memenuhi syarat serta kriteria kelayakan UPK akan dilayani. Dengan artian lain, kelompok masyarakat peminjaman dan anggotanya yang belum atau tidak memenuhi syarat dan kriteria kelayakan tidak akan dilayani dan harus ada pendampingnya terlebih dahulu sampai kelompok masyarakat dan peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam.

a. Kelayakan Kriteria kelompok masyarakat peminjam di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat telah membentuk dan memiliki anggota adalah seluruh anggota yang dinyatakan warga miskin serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan dari Kelompok Swadaya Masyarakat tentang pembukuan Kelompok Swadaya Masyarakat, persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman merupakan dari pinjaman, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat yang melakukan kegiatan menabung dengan tujuan kewirausahaan.
- 2) Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk memiliki tujuan untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial yang tinggi;

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

- 3) Dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat atas dasar kesepakatan seluruh anggota-anggotanya secara demokratis, transparan, sukarela, partisipatif, dan kesetaraan;
  - 4) Masyarakat khususnya keluarga miskin yang merupakan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat yang sesuai kriteria ditetapkan sendiri oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
  - 5) Jumlah minimal anggota Kelompok Swadaya Masyarakat 5 orang;
  - 6) Jumlah minimal anggota Kelompok Swadaya Masyarakat 30% perempuan
  - 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan
  - 8) Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat secara keseluruhan harus menyetujui sistem tanggung dan dinyatakan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
  - 9) Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat secara keseluruhan telah memperoleh dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Unit Pengelola Kegiatan dan fasilitator.
- b. Kriteria dari kelayakan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
- 1) Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki KTP Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
  - 2) Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat yang termasuk ke dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang akan disepakati dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat;

- 3) sesama anggota harus saling percaya dan dapat bekerja sama dengan anggota yang lain.
- 4) Semua anggota Kelompok Swadaya Masyarakat diharuskan mempunyai tabungan min. 5% dari peminjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya min. 5 % selama jangka waktu pinjaman yang ditentukan dan tabungan tidak akan diambil sebelum pinjamannya lunas (tidak wajib).
- 5) Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat diwajibkan memiliki motivasi untuk bekerja dan berusaha atau memiliki usaha mikro yang dimaksudkan untuk pendapatan, meningkatkan usaha, dan kesejahteraan;
- 6) Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat belum pernah bersangkutan dengan lembaga keuangan yang ada.

c. Skim pinjaman

Aturan Skim pinjaman sebagai berikut:

- 1) Peminjam diharuskan Kelompok Swadaya Masyarakat dan anggotanya yang memenuhi kriteria dan persyaratannya
- 2) Tujuan digunakannya pinjaman yaitu untuk kegiatan usaha bersifat produktif yang sudah ada maupun menciptakan peluang usaha akan di biayai.
- 3) Pertama kali pinjaman maksimal sebesar Rp 500.000,- namun harus disesuaikan dengan apa usaha yang dijalankan. Sedangkan selanjutnya pinjaman maksimal Rp. 2.000.000,- (di luar jumlah

maximal tersebut peminjam dapat meminjam dengan pola channeling dengan bank atau lembaga keuangan lainnya), batasan peminjaman max 4 kali.

- 4) Pinjaman yang diberikan kepada setiap usaha masyarakat yang terdiri dari 10 orang dengan “*tanggung renteng*” artinya kalau salah satu anggota yang tidak membayar cicilan maka anggota kelompok lainnya yang akan bertanggung jawab, yang menjadikan sinergitas antara seluruh anggota kelompok.
  - 5) Jangka waktu yang diberikan kalau ada pinjaman yaitu 3 sampai 12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjaman
  - 6) pinjaman diangsur maksimal bulanan, tanpa tenggang waktu (*grace period*)
  - 7) pemberian jasa peminjaman adalah satu setengah (1.5) sampai dengan tiga (3)% /bulan, dihitung dari pokok pinjaman awal.
- Seluruh operasional dari Unit Pengelola Kegiatan harus bisa ditutup dengan jasa pinjaman tersebut.

Selanjutnya, Masrukhin selaku kepala Desa menyatakan:

Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang sangat besar diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan tidak mudah untuk mengatasinya. Pemerintah Desa lewat PNPM Mandiri hadir untuk menangani masalah tersebut dengan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat dari menemukan, merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi semua kegiatan.

Pemerintah desa mengacu pada usulan kelompok, kelompok tersebut melakukan musyawarah untuk orang-orang

yang akan diberikan pinjaman, kemudian dari desa melakukan rekomendasi ke UPK.<sup>52</sup>

Dalam perencanaan diberikan peminjaman mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan antara lain:

a. Tahapan Pengajuan Pinjaman

Untuk mendapatkan pinjaman calon peminjam harus mempersiapkan segala sesuatu keperluan yang diprasyarkan oleh lembaga untuk memperoleh pinjaman, baik pembentukan simpanan, pelatihan, maupun melengkapi dokumen dan mengisi blangko pengajuan pinjaman.

Petugas Unit Pengelola Kegiatan dalam Tahapan pengajuan, diwajibkan memberikan penjelasan akan ketentuan peminjaman termasuk pinjaman ini bersifat bukan hibah melainkan hutang yang harus dibayar kembali,

b. Tahapan Pemeriksaan Pinjaman

Dokumen pengajuan pinjaman dicek dan diproses petugas Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya diajukan Kelompok Swadaya Masyarakat beserta anggotanya baik secara administratif maupun menganalisis kunjungan lapangan dan membuat pengusulan dan atau rekomendasi kepada ketua PNPM atas permohonan pinjaman.

c. Tahapan Putusan Pinjaman

Ketua PNPM memberi persetujuan dan atau memberikan penolakan atas setiap pengajuan dari pinjaman yang dilakukan oleh

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Masrukhin selaku kepala desa

Kelompok Swadaya Masyarakat yang didasarkan pada data dari petugas pinjaman Unit Pengelola Kegiatan yang dianalisis.

d. Tahapan Realisasi Pinjaman

Kelompok Swadaya Masyarakat memohon peminjaman yang disetujui oleh Ketua PNPM dokumen disiapkan untuk pencairan, selanjutnya dicairkan pembayarannya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat dan anggotanya.

Petugas Unit Pengelola Kegiatan pada tahapan realisasi ini wajib kembali menjelaskan dan menegaskan apa saja ketentuan pinjaman termasuk ketentuan bahwa peminjaman bukan hibah tapi merupakan utang yang wajib dibayar kembali.

e. Tahapan Pembinaan Pinjaman

Setelah pinjaman direalisasi Min. 1 bulan petugas PNPM diwajibkan melakukan pemantauan keadaan keadaan si peminjam, lalu perkembangan dari usaha peminjam dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sebagaimana mestinya.

Pada tahap ini petugas PNPM wajib mengingatkan kepada peminjam bahwa peminjam berkewajiban untuk mengangsur dan petugas wajib mengingatkan kembali kepada peminjam pinjaman ini bukan hibah tetapi utang.

f. Tahapan Pembayaran Kembali Pinjaman

Apabila ada peminjam yang terlambat atau menunggak ketika melakukan peminjaman, maka petugas dari UPK bersama pengurus

PNPM sebelum jangka waktu pembayaran diwajib mengingatkan peminjam atas kewajibannya. Petugas UPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pengawas UPK, tokoh masyarakat, aparat, maupun relawan.

Produk rencana masyarakat yaitu pinjaman rencana yang perlu dievaluasi dan review secara terus menerus untuk mencapai kesempurnaan dan sesuai kebutuhan dimasyarakat. Adapun kegiatan tersebut minimal dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat bersama pemerintah baik secara teknis maupun substansi untuk menggali usulan bersama dan mencapai kesepakatan bersama khususnya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan secara moral maupun materiil.

#### **1. Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Peran pemerintah dalam pelaksanaan di Desa Gajah Demak memiliki tujuan untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, menurut Masrukin selaku Kepala Desa menyatakan:

Peran pemerintah desa dalam merealisasikan pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak bertujuan memberikan pinjaman kepada keluarga miskin, rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar sehingga tidak lagi menganggur.<sup>53</sup>

Lebih lanjut Masrukin selaku Kepala Desa menjelaskan:

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Masrukhin selaku kepala desa

Pelaksanaan kegiatan PNPM memiliki sasaran utama di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak lewat peminjaman yaitu keluarga tidak mampu (berpendapatan rendah) di wilayah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dikhususkan kepada masyarakat miskin yang identifikasinya sudah ada dalam daftar keluarga tidak mampu dan masyarakat yang memiliki usaha sendiri.

Pemerintah Desa bersama tim ketua PNPM berkoordinasi kepada UPK kecamatan untuk merealisasikan pinjaman lunak yang diberikan kepada para peminjam tanpa agunan, hanya foto copy KTP.

Program PNPM mandiri di Desa Gajah ditangani sendiri oleh ketua program tersebut, sedangkan peran Pemerintah Desa adalah mengadakan kerja sama, memberikan motivasi agar pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut.<sup>54</sup>

Demikian juga menurut Sundari selaku Ketua PNPM Mandiri Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, menyatakan:

Desa Gajah adalah salah satu desa yang terdapat di dalam Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Karena bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak hanya mengandalkan lahan sawah yang menjadi pondasi dalam kehidupannya dan yang bermata pencaharian buruh hanya mengandalkan kerja serabutan yang setiap hari belum tentu ada. Apabila sawah yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu, begitu juga pada masyarakat yang bekerja sebagai buruh, jika tidak ada yang membutuhkan tenaganya maka kebutuhan hidupnya akan terganggu.<sup>55</sup>

Bagi para petani untuk mengembangkan hasil pertaniannya dan mengembangkan home industry memiliki suatu kondisi dimana itu menyulitkan dikarenakan faktor-faktor produksi yang masih sedikit bagi petani dan masyarakat, munculnya program PNPM Mandiri memberi

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Masrukhin selaku kepala desa

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM



solusi petani dan masyarakat dalam hal memenuhi faktor-faktor produksi, terutama hal pemenuhan permodalan. Karena adanya PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mampu memberikan solusi terutama dalam hal permodalan yang selama ini mereka butuhkan untuk mengembangkan hasil pertanian dan usaha home industry yang mulai digeluti. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga yang memiliki tujuan memenuhi pemodal usaha masyarakat tetapi tidak luput dari unsur laba. Setelah munculnya PNPM Mandiri, animo masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Program yang ditawarkan PNPM Mandiri yaitu program “Pinjaman Jasa Bergulir”.

Sundari selaku Ketua PNPM Mandiri Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, menyatakan:

Program “Pinjaman Jasa Bergulir” PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur PNPM dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa persen atau berapa nominal pengembaliannya.<sup>56</sup>

Hasil dari pengembalian masyarakat kepada pihak PNPM mandiri, dialokasikan untuk biaya operasional dan sisanya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat berupa pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

Lebih lanjut Sundari. Ketua PNPM Mandiri Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, menyatakan:

Sistem pinjaman diatur secara bergilir sesuai dengan kesepakatan BKM dan keseluruhan masyarakat serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. Keuntungan (Laba) minimal dapat menutup biaya operasional untuk membiayai kegiatan BKM dan lainnya, dan untuk meningkatkan modal (AD mengatur ketentuannya).

Usaha yang dikembangkan dalam program PNPM Mandiri di Desa Gajah meliputi jualan sembako, makan ternak, warung makan, aluminium, pakaian dan lain-lain. Pemberian modal dilihat dari usahanya, jika usahanya termasuk usaha kecil-kecilan maka pertama akan diberi pinjaman kecil dulu.

Bagi ketua kelompok, sarana dan prasarana tidak ada, karena tugasnya hanya mengkoordinir pinjaman tersebut dalam pelaksanaan pendampingan usaha tidak dilakukan langsung oleh PNPM, akan tetapi PNPM memantau terus usahanya.<sup>57</sup>

Kegiatan ekonomi untuk peningkatan modal penting, menurut H.

Masrukin, Kepala Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak:

Perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan selanjutnya karena masyarakat diharapkan untuk bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin dan pengangguran melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah pada koridor penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut:

- a. Bermanfaat bagi warga miskin dan pengangguran
- b. Memberikan peningkatan ekonomi
- c. Perubahan perilaku
- d. Lingkungan tertata
- e. Permasalahan dapat terselesaikan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

<sup>58</sup> Wawancara dengan Masrukhin selaku kepala desa

Adanya kegiatan itu, setiap kelompok diharapkan mampu, menyesuaikan sumber daya, mengontrol gerak, memilih cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan pengangguran terutama masyarakat miskin.

Semangat dan proses pembelajaran tidak kalah penting dalam memperkuat penerapan nilai keterbukaan, partisipasi serta tanggung jawab dan mendorong terjadinya sosial kontrol bagi warga terhadap program pembangunan yang menjadikan komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Lebih lanjut Masrukhin, Kepala Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menyatakan:

Keterlibatan masyarakat dalam pinjaman bergulir sangat antusias akan tetapi sifatnya terbatas, karena masyarakat yang diberikan pinjaman hanya yang mempunyai usaha saja.<sup>59</sup>

Astuti sebagai salah satu warga Desa Gajah yang mengikuti program PNPM mengetahui bahwa program dari pemerintah yang berguna untuk memberdayakan masyarakat. PNPM Mandiri di Desa Gajah pelaksanaannya yaitu melalui pinjaman bergulir. Astuti menyatakan:

Program PNPM Mandiri di Desa Gajah lebih ke arah memberikan bantuan pinjaman bagi pelaku usaha-usaha di Desa Gajah, maka sebagai anggota keterlibatan dalam program ini yaitu ikut serta dari

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Masrukhin selaku kepala desa

adanya program PNPM yang didalamnya ada pinjaman bergulir bagi pelaku UMKM merasa terbantu untuk dapat mengembangkan usaha.<sup>60</sup>

## 2. Pelaksanaan PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Pelaksanaan program kerja PNPM melalui pinjaman di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, saat ini banyak UMKM (Usaha Masyarakat Kecil Menengah) dari beberapa kelompok dengan usaha berupa pembuatan kandang buru, kusen, parut, guling, pedagang keliling dan warung kecil-kecilan dimana semuanya berkembang dan dilaksanakan oleh setiap anggota tanggung renteng, setiap anggota kelompok harus aktif melakukan diskusi yang diketuai oleh ketua kelompok masing-masing dalam mengembangkan usahanya dan dapat mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian dan jangka waktu yang ditentukan sehingga ketika butuh pinjaman yang lebih besar dapat dicairkan oleh program PNPM.

Sarana dan prasarana dilakukan di rumah masing-masing ketua kelompok, untuk pihak desa tidak memberikan sarana dan prasarana, hanya mengkoordinasi kegiatan. Jika terjadi masalah baru ditarik ke desa dengan mengadakan pertemuan di balai desa.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Astuti selaku warga yang tergabung dalam PNPM

### 3. Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan pengawasan atau Evaluasi PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Peran pemerintah Desa Merealisasikan pengawasan atau Evaluasi PNPM Mandiri di Desa Gajah Demak dilakukan dengan mengontrol kerja PNPM dan memberikan bimbingan kepada pengurus PNPM karena pada dasarnya pengawasannya langsung melekat kepada ketua kelompok, jika terdapat salah satu anggota yang tidak bisa membayar pinjaman maka bebannya nanti untuk bulan berikutnya akan ditunda pencairannya. Agar program tersebut dapat terealisasi bagi anggota yang tidak bisa membayar bisa dimusyawarahkan melalui ketua kelompok. Kemudian pemerintah desa memberikan koordinasi kepada ketua kelompok bagaimana arah PNPM yang sudah disalurkan kepada masyarakat untuk cara mengangsur agar tidak terjadi kemacetan.

Kegiatan pinjaman bergulir ini tentunya merupakan salah satu program yang digemari masyarakat dan semangat dalam menjalankan usahanya, namun kegiatan ini terdapat faktor penghambatnya yaitu dalam membayar angsuran terdapat beberapa masyarakat yang tidak bisa tepat waktu.

Sundari selaku ketua PNPM Mandiri Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, menyatakan:

Kalau dalam hal pengawasannya tidak ada, karena setiap bulannya diadakan pertemuan anggota dirumah ketua kelompok, kemudian

mengevaluasi apakah ada masalah dalam usahanya, serta mengangsur pinjamannya.<sup>61</sup>

Lebih lanjut Rohimah selaku warga yang menjadi ketua kelompok dalam kegiatan PNPM menyatakan:

Evaluasi juga dilakukan melalui usul dari anggota kelompok terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dipertimbangkan dan diskusikan dibawah bimbingan UPK untuk dicarikan solusi dan inisiatif untuk mengatasi permasalahan sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pengangguran di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak semakin berkurang. Hasil dari pemeriksaan dilaporkan kepada anggota setiap tri wulan dan pada tutup buku akhir tahun.<sup>62</sup>

Saling mengawasi dan memberikan teguran kepada masyarakat yang mempunyai kelompok merupakan partisipasi dalam evaluasi dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh PNPM dan reward berupa uang 1 juta atau 2 juta diberikan kepada kelompok yang pengembaliannya tepat waktu dari pinjaman yang dilakukan sebagai sarana saling dukung kepada masing-masing kelompok.

#### **D. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu akan ditemui hambatan-hambatan, begitu juga dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa dalam realisasi PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini ditemukan beberapa faktor

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

<sup>62</sup> Wawancara dengan Rohimah selaku warga sekaligus ketua kelompok kegiatan PNPM

penghambatnya. Adapun Faktor penghambat dari realisasi PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak antara lain:

c. Terbatasnya bantuan dana dari pemerintah

Dalam merealisasikan PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini memiliki kendala yakni perihal dana. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Sundari selaku ketua PNPM, bahwa:

Ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PNPM di Desa Gajah ini diantaranya adalah kurangnya dana, karena dana bantuan dari pemerintah jumlahnya terbatas.<sup>63</sup>

Salah satu sumber dana ini datang dari pemerintah yang mana jumlahnya terbatas. Dalam hal ini Rohimah selaku ketua kelompok dalam kegiatan PNPM mengungkapkan:

Salah satu sumber dana itu datang dari pemerintah, namun jumlahnya sangat terbatas.<sup>64</sup>

Kurangnya bantuan dana dari pemerintah ini berakibat pada masyarakat, padahal banyak sekali dari masyarakat yang berminat bergabung sebagai peserta namun karena keterbatasan dana jadi diterapkan sistem bergilir itu berarti harus sabar menunggu. Hal serupa disampaikan Astuti selaku anggota PNPM bahwa:

Kalau mau meminjam itu harus sabar menunggu dikarenakan keterbatasan dana jadi ada penerapan sistem bergilir<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sundari selaku warga sekaligus ketua PNPM

<sup>64</sup> Wawancara dengan Rohimah selaku warga sekaligus ketua kelompok kegiatan PNPM

<sup>65</sup> Wawancara dengan Astuti selaku warga anggota kelompok kegiatan PNPM

Selanjutnya, terkait dengan kesiapan anggaran dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan harus didukung pula dengan kesiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan pelaksanaan termasuk di dalamnya sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

#### d. Pengembalian Pinjaman

Terkait realisasi PNPM tentu akan ada uang yang dipinjamkan kepada masyarakat dan pengembalian dari masyarakat. Dalam hal pengembalian pinjaman dana juga mengalami kendala yang cukup serius karena beberapa dari peminjam memiliki kesadaran untuk mengembalikan namun ada pula peminjam yang kurang sadar bahkan tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan. Rohimah selaku ketua kelompok kegiatan PNPM mengungkapkan:

Di kegiatan PNPM pasti ada dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dan semestinya harus dikembalikan tepat pada waktunya karena dana itu sifatnya bergilir jadi akan pindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Beberapa dari yang dipinjam memiliki kesadaran untuk mengembalikan tapi ada juga yang kurang sadar dan tidak sadar untuk mengembalikannya dengan berbagai alasan bahkan ada yang sampai kabur atau lari dari tanggung jawabnya”<sup>66</sup>

Proses pengembalian pinjaman yang sulit ini dikarenakan pinjaman yang dipinjam biasanya tidak digunakan sebagaimana mestinya atau dialokasikan untuk kebutuhan yang lain jadi alasan tidak mengembalikan karna tidak memiliki uang ataupun dengan alasan lainnya bahkan ada juga yang lari dari tanggung jawabnya karena

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Rohimah selaku warga sekaligus ketua kelompok kegiatan PNPM



tidak mau membayar ataupun mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Astuti selaku warga yang tergabung dalam PNPM yang menjelaskan:

Terkait pengembalian pinjaman ada kendala yaitu ada yang tidak punya uang ada juga yang selalu kabur saat ditagih salah-olah tidak mau membayar pinjaman tersebut<sup>67</sup>

Jadi sudah jelas bahwa dalam hal pengembalian pinjaman dana ini merupakan kendala yang cukup serius karena tanpa ada pengembalian dana tentu tidak ada uang yang dapat digulirkan ke masyarakat yang lain.

e. Pelatihan

Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tentu dibutuhkan proses pelatihan bagi para peserta yang tergabung di dalamnya baik nantinya akan mendatangkan pemateri atau tenaga ahli dari luar desa maupun para pemerintah desa yang sudah dibekali ilmu sehingga dapat menyalurkannya ilmu kepada masyarakat. Disaat awal-awal jadwal pelatihan PNPM masyarakat sangat berantusias untuk mengikuti pelatihan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu ketika di jadwalkan pelatihan lanjutan antusias dan semangat masyarakat cukup menurun dengan berbagai alasan. Hal ini seperti yang disampaikan Sundari selaku ketua PNPM bahwa:

Untuk pelatihan dalam kegiatan PNPM waktu awal dulu diselenggarakan ya masyarakat antusias dan semangatnya tinggi tapi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Astuti selaku anggota kelompok kegiatan PNPM

untuk pelatihan lanjutan atau yang diadakan berkala semangat dan antusiasnya menurun<sup>68</sup>

Lebih lanjut Rohimah selaku ketua kelompok dalam kegiatan PNPM menyampaikan:

Kalau pelatihan berlanjut sepertinya semangat masyarakat sudah mulai menurun karena berbagai alasan, misalnya malas berangkat dan lebih memilih istirahat atau tidur di rumah<sup>69</sup>

Dapat diketahui bahwa dalam merealisasikan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupten Demak ditemui beberapa kendala yang begitu berarti yakni terbatasnya bantuan dana yang diberikan pemerintah, proses pengembalian dana pinjaman yang kurang lancar, dan pelatihan berkala yang ditujukan masyarakat yang bergabung dalam PNPM semakin kurang diminati.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sundari selaku ketua PNPM

<sup>69</sup> Wawancara dengan Rohimah selaku warga sekaligus ketua kelompok kegiatan PNPM

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEREALISASIKAN PNPM MANDIRI DI DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Peran Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

PNPM Mandiri merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh desa tertentu. Secara umum tujuan dari PNPM Mandiri ini adalah untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam hal Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang sanggup mengelola potensi dan sumber yang ada di sekitarnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penyesuaian yang dilakukan oleh PNPM sebagai usaha untuk mengentas kemiskinan yaitu dengan penyediaan kesempatan kerja serta untuk memperoleh pendapatan yang dikhususkan kepada masyarakat yang tidak terampil dan pengangguran.

Hal ini pula yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri di Desa Gajah Demak. Tujuan PNPM untuk membantu masyarakat miskin, khususnya untuk membantu orang-orang yang mempunyai umkm yang bertujuan agar dapat mengembangkan usahanya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha akan terbantu dan usahanya bisa berkembang.

Dalam proses perjalanannya PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dibutuhkan peran pemerintah desa. Peran pemerintah desa adalah mengadakan kerja sama, memberikan motivasi agar

pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut, selain itu pemerintah desa juga dituntut untuk bisa merealisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi kerja PNPM Mandiri. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Aprilita (2013) bahwa dalam pengelolaan PNPM Mandiri Pedesaan membutuhkan peran pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

### **1. Perencanaan Pemerintah Desa dalam merealisasikan perencanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kabupaten Demak**

Dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam hal ini: *Pertama*, dimulai dari pihak pemerintah desa memilih salah satu anggota pemerintah desa untuk menjadi ketua dalam program tersebut, kemudian ketua turun ke masyarakat mengadakan pertemuan tingkat RW untuk merekrut masyarakat yang mau ikut serta dalam program tersebut. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) diberi kepercayaan oleh pemerintah desa untuk mengelola program untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Peran ketua dalam perencanaan, awalnya diadakan kumpulan hanya se-RW, program dapat berjalan lancar, kemudian yang mengikuti program tersebut se-desa (yang memiliki usaha). Dalam pengelolaannya LKM diberikan misi oleh pemerintah untuk menunjang program yang dibuatnya yaitu untuk menanggulangi kemiskinan. Program tersebut dinamakan “Pinjaman jasa

Bergulir” merupakan salah satu dari program kerja PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Dalam hal ini peran pemerintah Desa dalam mendukung perencanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Demak dengan melibatkan masyarakat dan di sini masyarakat harus terlibat secara aktif mulai dari perencanaan program, pembentukan kelompok, pelaksanaan program, pencarian dana dan sebagainya.

Peran pemerintah Desa dalam merealisasikan perencanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kabupaten Demak diserahkan semua kepada ketua PNPM dan kelompoknya yang pada dasarnya pemerintah desa mengarahkan untuk diaplikasikan oleh UPK khususnya program pinjaman sesuai pada pedoman teknis mengenai pengelolaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah dalam setiap realisasi perencanaan program PNPM Mandiri Desa Gajah Demak terkandung beberapa pokok pikiran diantaranya: 1) masa depan merupakan orientasi pada setiap perencanaan; 2) kesengajaan merupakan wujud dari perencanaan bukannya kebetulan, karena perencanaan terwujud karena adanya pemikiran yang sistematis yang didasarkan pada eksplorasi yang telah dilakukan; 3) tindakan secara sistematis perlu dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok dalam proses perencanaan, dan keempat kebermaknaan merupakan hal yang penting dalam perencanaan, sehingga efektif dan efisien dapat tercapai dalam setiap perencanaan.

Pola yang dirancang secara sistematis dalam perencanaan mulai dari data peminjam yang akan menerima pinjaman, pengelolaan setiap hasil pinjaman dan dilanjutkan dengan pengembangan dari setiap hasil pinjaman, menjadikan UMKM yang mendapat pinjaman dari PNPM mandiri di Desa Gajah Demak berjalan tepat arah dan sistematis. Hal ini menunjukkan PNPM mandiri di Desa Gajah Demak telah melakukan perencanaan dengan baik dan sistematis terutama dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga mampu mengembangkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan, karena setiap program yang dikembangkan tepat sasaran.

## **2. Pelaksanaan Pemerintah Desa dalam merealisasikan perencanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kabupaten Demak**

Peran pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan program PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak memiliki tujuan agar tersedianya akses pelayanan keuangan pada setiap masyarakat dengan pola pinjaman bergulir mikro berbasis pasar kepada rumah tangga miskin agar nantinya keluarga miskin tersebut dapat memperbaiki keadaan perekonomiannya dan mampu memberikan pembelajaran bagi keluarga miskin tersebut agar dapat memanfaatkan secara maksimal setiap pinjaman yang diperoleh secara produktif dan tepat guna.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman di PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah rumah tangga miskin

yang berada di wilayah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, khususnya mereka yang terdata dalam data base desa termasuk golongan rumah tangga miskin yang bergerak dalam UMKM. Pengangguran yang semakin bertambah karena banyaknya PHK menjadikan program ini menjadi angin segar bagi masyarakat guna menata perekonomiannya dengan berwirausaha, tentunya tidak hanya diberikan modal namun juga diberikan pelatihan agar nantinya usaha yang dilakukan dapat berkembang dan mampu menopang kehidupan perekonomian keluarga miskin tersebut dan targetnya terjadi peningkatan ke arah keluarga sejahtera dengan usaha yang dilakukan.

Masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang sebagian besar adalah petani dan buruh dengan mengandalkan hasil tanaman padi dan kerja serabutan bagi buruh tentunya sangat rentang dengan kekurangan dalam ekonomi, dan ketika mau menjadi wirausaha terkendala dengan modal yang tidak dimiliki, oleh karena itu hadirnya PNPM Mandiri yang membantu permodalan masyarakat untuk menjadi wirausaha menjadi angin segar bagi masyarakat sehingga memiliki tambahan pendapatan keluarga, sedangkan ketika masyarakat melakukan peminjaman modal di lembaga keuangan yang berbasis profit maka akan menjadi masalah berikutnya bagi keluarga miskin tersebut. Pinjaman jasa bergulir mampu menjadi bentuk permodalan bagi masyarakat sehingga mereka antusias untuk mengikutinya.

Pola pengembalian pinjaman yang tidak memaksa dan ditanggung renteng oleh setiap kelompok dan kelebihan dari masyarakat dapat dijadikan operasional PNPM dan kembali lagi kepada masyarakat dengan bentuk sarana prasarana desa seperti jembatan, jalan dan sebagainya menjadikan program PNPM ini adalah program berbasis partisipasi masyarakat. Agar program PNMP mandiri dapat berjalan dengan baik tentunya pengurus PNPM membutuhkan kerja sama, masukan dan motivasi dari pemerintah Desa dan masyarakat dalam setiap penyusunan program yang dilakukan, sehingga proses saling menguntungkan terjadi dalam setiap kerja PNPM.

Peran pemerintah dalam realisasi pelaksanaan program PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan dimensi dari setiap kebutuhan masyarakat menurut peneliti sebagai berikut: 1) Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) PNPM mandiri mampu mencapai kemajuan dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi; 3) Terjaminnya relevansi kebutuhan masyarakat dan program yang dilakukan PNPM Mandiri; 4) Terjadi peningkatan keterampilan pada diri masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomiannya.

Peran pemerintah dalam realisasi pelaksanaan program PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana yang dijelaskan di atas seharusnya dikembangkan dengan mengedepankan prinsip partisipatoris yang didukung SDM yang potensial, selain itu hal yang tidak kalah penting dalam pemberian kebebasan secara penuh



kepada PNPM Mandiri untuk dapat mengembangkan skill yang ada pada masyarakat dengan pembentukan lingkungan yang strategis, sehingga pada akhirnya akan terwujud tujuan program PNPM Mandiri yang diharapkan.

### **3. Pengawasan/ Evaluasi Pemerintah Desa dalam merealisasikan perencanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kabupaten Demak**

Peran pemerintah desa Merealisasikan pengawasan atau Evaluasi PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam pandangan peneliti mengarah pada 2 kriteria yaitu 1) efisiensinya, dimana apakah SDM yang ada di PNPM Mandiri telah dimanfaatkan secara optimal dan tepat guna. 2) efektivitasnya, ketercapaian tujuan telah tercapai seberapa jauh. Peran pemerintah desa merealisasikan pengawasan atau evaluasi PNPM Mandiri Desa Gajah Demak dilakukan dengan mengontrol kerja PNPM dan memberikan bimbingan kepada pengurus PNPM karena pada dasarnya pengawasannya langsung melekat kepada ketua kelompok, jika terdapat salah satu anggota yang tidak bisa membayar pinjaman maka bebannya nanti untuk bulan berikutnya akan ditunda pencairannya. Agar program tersebut dapat terealisasi bagi anggota yang tidak bisa membayar bisa dimusyawarahkan melalui ketua kelompok. Kemudian pemerintah desa memberikan koordinasi kepada ketua kelompok bagaimana arah PNPM yang sudah disalurkan kepada masyarakat untuk cara mengangsur agar tidak terjadi kemacetan.

Evaluasi PNPM Mandiri di Desa Gajah berangkat dari usul dari setiap anggota kelompok akan permasalahan yang dihadapi, kemudian dilakukan pertimbangan dan diskusi di bawah naungan Unit Penyelenggara Kegiatan untuk dicarikan berbagai solusi dan berbagai inisiatif pemecahan masalah sehingga setiap program kerja dapat berjalan dengan baik dan terjadi perkembangan perekonomian masyarakat. Pelaporan dilakukan setiap triwulan dan akhir tahun ketika tutup buku yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada anggota sedangkan pengawasannya tidak ada, karena setiap bulannya diadakan pertemuan anggota di rumah ketua kelompok, kemudian mengevaluasi apakah ada masalah dalam usahanya, serta mengangsur pinjamannya.

Hal ini menunjukkan peran pemerintah desa lebih sebagai koordinator dan lebih banyak memberikan kebebasan kepada PNPM dan kelompok masyarakat untuk mandiri dalam mengembangkan program tersebut demi kemajuan kelompok masyarakat tersebut, sehingga peran evaluasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah desa akan lebih maksimal karena melibatkan masyarakat secara penuh dalam evaluasi dan pengawasan.

#### **B. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri merupakan salah satu program nasional yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat baik terkait dengan sarana fisik atau pengembangan usaha. Dalam hal ini peran Pemerintah Desa sangat penting dalam rangka menyukseskan program

tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat merealisasikan kegiatan PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini akan ditemui beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Kholijah (2018:63-64) menjelaskan bahwa dalam merealisasikan PNPM Mandiri akan ditemui dua faktor penghambat yaitu 1) Terbatasnya dana dari pemerintah; dan 2) Pengembalian pinjaman. Dalam penelitian ini sangat sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Kholijah tersebut.

Faktor-faktor yang dapat menjadi menghambat pemerintah desa dalam merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ialah sebagai berikut. *Pertama*, terbatasnya bantuan dana dari pemerintah sehingga berakibat pada masyarakat yang harus sabar menunggu giliran untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut. *Kedua*, pengembalian pinjaman dana juga menjadi kendala yang cukup serius karena beberapa dari peminjam kurang memiliki kesadaran bahkan tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini terjadi karena pinjaman tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh peminjam atau bisa saja dialokasikan untuk kebutuhan yang lain jadi alasan tidak mengembalikan karena tidak memiliki uang ataupun dengan alasan lainnya bahkan ada juga yang lari dari tanggung jawabnya karena tidak mau membayar ataupun mengembalikan pinjaman tersebut. *Ketiga*,

Pelatihan berkala atau pelatihan lanjutan menjadi suatu hal yang kurang diminati masyarakat atau kurang menarik antusias masyarakat untuk datang dalam pelatihan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Pertama*, dengan ikut terlibat dalam perencanaan dengan memilih salah satu anggota pemerintah desa untuk menjadi ketua dalam program dan mengarahkan pimpinan PNPM untuk bekerja berdasarkan tugas pokok PNPM Mandiri. *Kedua*, pemerintah berperan dalam merealisasikan pelaksanaan dengan mengadakan kerja sama, memberikan motivasi agar pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut. *Ketiga*, merealisasikan pengawasan atau Evaluasi PNPM Mandiri di dengan mengontrol kerja PNPM dan memberikan bimbingan kepada pengurus PNPM karena pada dasarnya pengawasannya langsung melekat kepada ketua kelompok.
2. Faktor penghambat pemerintah desa dalam merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ialah: *Pertama*, terbatasnya bantuan dana dari pemerintah sehingga berakibat pada masyarakat yang harus sabar menunggu giliran untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut. *Kedua*, pengembalian pinjaman dana juga menjadi kendala yang cukup serius

karena beberapa dari peminjam kurang memiliki kesadaran bahkan tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini terjadi karena pinjaman tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh peminjam atau bisa saja dialokasikan untuk kebutuhan yang lain jadi alasan tidak mengembalikan karena tidak memiliki uang ataupun dengan alasan lainnya bahkan ada juga yang lari dari tanggung jawabnya karena tidak mau membayar ataupun mengembalikan pinjaman tersebut. *Ketiga*, Pelatihan berkala atau pelatihan lanjutan menjadi suatu hal yang kurang diminati masyarakat atau kurang menarik antusias masyarakat untuk datang dalam pelatihan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran, antara lain:

### **1. Kepala Desa**

Kepala desa perlu mengelola program kerja yang lebih sistematis dengan tetap memberikan dukungan baik sarana dan prasarana maupun birokrasi yang mudah agar program PNPM dapat berjalan secara efektif

### **2. Pengelola PNPM**

Memajukan kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dari program PNPM mandiri, sehingga setiap program yang dijalankan perlu memiliki visi yang kuat dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan menekankan pada etos kerja yang tinggi, kejujuran dan kesetaraan diantara masyarakat dalam menerima bantuan modal dan

pemberian pelatihan dalam meningkatkan usahanya. Program yang mengacu pada ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas dalam setiap program PNPM.

### 3. Anggota Kelompok Usaha

Tanggung jawab yang besar bagi setiap anggota kelompok usaha dalam mengembalikan pinjaman harus menjadi visi utama dalam setiap anggota kelompok, selain daya inovatif, kreatif, etos kerja yang tinggi dan kejujuran perlu ditanamkan dan dilakukan oleh setiap anggota kelompok dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya yang pada akhirnya akan mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar, sehingga tingkat kemiskinan di wilayahnya dapat dikurangi

### 4. Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat dibutuhkan dalam mengembangkan setiap program PNPM Mandiri, program PNPM tersebut mengarah pada filosofi dari, oleh dan untuk rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen, Roberto, Krisna Wijaya, dan I Dewa Gede Suthapa. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjan UGM, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Badan Pusat Satatistik, *Indikator Ekonomi*, Jakarta, BPPS, 2016
- Dale, Ernest dam Michelon, *Metode-metode Managemen Moderen*, Jakarta: Andalas Putra, 2011
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2016
- Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta, 2008
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.
- Effendy, Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Habibah, Nur, "Keunggulan Ekonomi Islam Dimensi Moral", *Jurnal Tiga Bulanan Cides* Vol. I, No. 2, April-Juni, 2006
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2004
- Handoko, Hani, *Manajemen*, Edisi II, Yogyakarta: BPPF, 2008
- Hasan, Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora, 2005
- Hasyimi, Sayyid Ahmad al, *Mukhtar al-Hadits an-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- Ibrahim, Tahir, *Pembahasan Ekonomi Islam Marx dan Keynes*, Jakarta: tp., 2007
- Jima, Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 14, No. 2, 2013



- Kahf, Monzer, *the Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System: Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Kholijah, Siti, *Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018
- Kristiniati, Rahayu dan Ilmi Usrotin Choiriyah, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo”, *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 2, September 2014
- Matdoan, Usman, “Peranan Program PNPM-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal”, *Jurnal Biology Science & Education* Vol. 4 No. 1 edisi Jan-Jun 2015
- Mohi, Widya Kurniati, Rusdin Djibu, dan Yena Dunggio, “Peran Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2017.
- Morissan, *Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2003
- Murbeng, Siaga Basu, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Riyanto “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, 2019
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Prawiranegara, Saifudin, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: tp., 2007
- Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Sa’ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Suatu Pendekatan Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005

- Sapala, Aprilita, Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Nabdiri Perdesaan Di Desa Empiyang, *Governance Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*
- Sastropoetro, R.A. Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2013
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bine Reka Pariwisata, 2012
- Tilaar, H.A.R., *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Triyono, Bambang, dkk, *Evaluasi PNPM Mandiri, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor*, Bappenas, 2013

# **Lampiran-Lampiran**

## **Lampiran Pedoman Wawancara**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Responden: Kepala Desa Gajah

#### **Identitas Diri**

Nama :

Asal :

Profesi :

Usia :

Jabatan:

#### **Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?
4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?
7. Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah yang menonjol apakah berhubungan dengan kegiatan ekonomi?
8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
9. Apa yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
10. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Responden: Ketua PNPM

### **Identitas Diri**

Nama :

Asal :

Usia :

Jabatan:

### **Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?
4. Apakah antusias masyarakat besar untuk ikut bergabung dalam PNPM mandiri di Desa Gajah?
5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?
7. Apakah ada sistem yang mengatur jalannya kegiatan yang menonjol PNPM Mandiri di Desa Gajah tersebut?
8. Bagaimana langkah untuk menjalankan kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah tersebut?
9. Bagaimana proses perencanaan kegiatan yang menonjol tersebut dalam kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
10. Apa sumber mata pencaharian masyarakat Desa Gajah sehingga akan diadakannya PNPM Mandiri di Desa Gajah pada waktu itu?
11. Adakah pengawasan khusus terkait kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
12. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Responden: Ketua LKMD

### **Identitas Diri**

Nama :

Asal :

Profesi :

Usia :

Jabatan:

### **Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?
4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
6. Bagaimana perencanaan dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
7. Apakah ada tim review untuk memantau PNPM di Desa Gajah?
8. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Responden: Ketua kelompok kegiatan PNPM

### **Identitas Diri**

Nama :

Asal :

Profesi :

Usia :

Jabatan:

### **Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?
4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?
7. Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah yang menonjol apakah berhubungan dengan kegiatan ekonomi?
8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?.
9. Bagaimana evaluasi pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
10. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Responden: Masyarakat yang menjadi anggota PNPM

### **Identitas Diri**

Nama :

Asal :

Profesi :

Usia :

Jabatan:

### **Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?
4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?
6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?
7. Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah yang menonjol apakah berhubungan dengan kegiatan ekonomi?
8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?
9. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?



## Lampiran Transkrip Hasil Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Responden: Kepala Desa

#### Identitas Diri

Nama : Masrukhi  
Asal : Gajah  
Profesi : Pemerintah Desa  
Usia : 56 tahun  
Jabatan : Kepala Desa

#### Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: PNPM Mandiri Desa Gajah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan secara Mandiri di Desa Gajah yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat

2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Tujuan PNPM Mandiri Desa Gajah seperti tujuan PNPM Pada umumnya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran

3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: PNPM Mandiri di Desa Gajah di tangani oleh ketua PNPM

4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah??

Jawab: Menurut saya cukup banyak karena antusias masyarakat ingin mencapai kesejahteraan

5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah??

Jawab: Ada yang konsisten dan ada yang tidak konsisten. Ya kemungkinan semngat hanya di awal saja

6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang sangat besar diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan tidak mudah untuk mengatasinya. Pemerintah Desa lewat PNPM Mandiri hadir untuk menangani masalah tersebut dengan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat dari menemukan, merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi semua kegiatan. Pemerintah desa mengacu pada usulan kelompok, kelompok tersebut melakukan musyawarah untuk orang-orang yang akan diberikan pinjaman, kemudian dari desa melakukan rekomendasi ke UPK.

7. Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah yang menonjol apakah berhubungan dengan kegiatan ekonomi?

Jawab: iya tentu, Perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan selanjutnya karena masyarakat diharapkan untuk bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin dan pengangguran melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah pada koridor penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut:

- a. Bermanfaat bagi warga miskin dan pengangguran
- b. Memberikan peningkatan ekonomi
- c. Perubahan perilaku

- d. Lingkungan tertata
- e. Permasalahan dapat terselesaikan.

8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Peran pemerintah desa memilih salah satu anggota pemerintah desa untuk menjadi ketua dalam program tersebut, kemudian ketua turun ke masyarakat mengadakan pertemuan tingkat RW untuk merekrut masyarakat yang mau ikut serta dalam program tersebut. Pemerintah Desa Juga memberikan kepercayaan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk mengelola salah satu program dalam pencapaian tujuannya. LKM adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan “Pinjaman” kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dalam pengelolaannya pemerintah membuat suatu program yang menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan “Pinjaman jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja PNPM Mandiri di Desa.

Kemudian, peran pemerintah desa dalam merealisasikan pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak bertujuan memberikan pinjaman kepada keluarga miskin, rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar sehingga tidak lagi menganggur.

9. Bagaimana pelaksanaan dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Pelaksanaan kegiatan PNPM memiliki sasaran utama di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak lewat peminjaman yaitu

keluarga tidak mampu (berpendapatan rendah) di wilayah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak , dikhususkan kepada masyarakat miskin yang identifikasinya sudah ada dalam daftar keluarga tidak mampu dan masyarakat yang memiliki usaha sendiri. Pemerintah Desa bersama tim ketua PNPM berkoordinasi kepada UPK kecamatan untuk merealisasikan pinjaman lunak yang diberikan kepada para peminjam tanpa agunan, hanya foto copy KTP.

Program PNPM mandiri di Desa Gajah ditangani sendiri oleh ketua program tersebut, sedangkan peran Pemerintah Desa adalah mengadakan kerja sama, memberikan motivasi agar pinjaman-pinjaman dapat bergulir kepada masyarakat, berkoordinasi, serta membantu jika terjadi permasalahan dalam kelompok tersebut.

10. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Pasti ada, setahu saya dari kabar yang beredar tentang pengembalian dana yang dipinjam oleh masyarakat tidak begitu lancar.

## PEDOMAN WAWANCARA

Responden: Ketua PNPM

### Identitas Diri

Nama : Sundari  
Asal : Gajah  
Profesi : Pemerintah Desa  
Usia : 42 tahun  
Jabatan : Ketua PNPM

### Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: PNPM Mandiri Desa Gajah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang mana program ini turun dari pemerintah dan dilakukan secara mandiri di Desa Gajah yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat

2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Pada intinya, untuk mensejahterakan masyarakat

3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Saya sendiri selaku ketua PNPM dan pemerintah desa serta masyarakat yang bergabung dalam PNPM turut membantu saya

4. Apakah antusias masyarakat besar untuk ikut bergabung dalam PNPM mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Lumayan banyak sebab mereka sadar hal ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran

5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah??

Jawab: Ya ada yang konsisten dan ada yang tidak konsisten. Apalagi untuk program pelatihan dalam kegiatan PNPM waktu awal dulu diselenggarakan ya masyarakat antusias dan semangatnya tinggi

tapi untuk pelatihan lanjutan atau yang diadakan berkala semangat dan antusiasnya menurun

6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: iya ada, proses peminjaman dana untuk masyarakat menggunakan system bergilir. Dan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok beserta anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman dari UPK.

Program “Pinjaman Jasa Bergilir” PNPM Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur PNPM dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa persen atau berapa nominal pengembaliannya.

7. Apakah ada sistem yang mengatur jalannya kegiatan yang menonjol PNPM Mandiri di Desa Gajah tersebut?

Jawab: Sistem pinjaman diatur secara bergilir sesuai dengan kesepakatan BKM dan keseluruhan masyarakat serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. Keuntungan (Laba) minimal dapat menutup biaya operasional untuk membiayai kegiatan BKM dan lainnya, dan untuk meningkatkan modal (AD mengatur ketentuannya).

Usaha yang dikembangkan dalam program PNPM Mandiri di Desa Gajah meliputi jualan sembako, makan ternak, warung makan, aluminium, pakaian dan lain-lain. Pemberian modal dilihat dari usahanya, jika usahanya termasuk usaha kecil-kecilan maka pertama akan diberi pinjaman kecil dulu.

Bagi ketua kelompok, sarana dan prasarana tidak ada, karena tugasnya hanya mengkoordinir pinjaman tersebut dalam pelaksanaan pendampingan usaha tidak lakukan langsung oleh PNPM, akan tetapi PNPM memantau terus usahanya.

8. Bagaimana langkah untuk menjalankan kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah tersebut?

Jawab: Awal mula pengurus PNPM membuat perkumpulan tingkat RW, kelompok tersebut diberi nama Lestari, kemudian mendata masyarakat yang mau ikut serta dengan program tersebut bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Peran ketua dalam perencanaan, pertama diadakan kumpulan hanya se-RW, program dapat berjalan lancar, kemudian yang mengikuti program tersebut se-desa (yang memiliki usaha)

9. Bagaimana proses perencanaan kegiatan yang menonjol tersebut dalam kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasarkan pada pedoman teknis yang mengenai bagaimana mengelola program khususnya pinjaman bagi pengembangan ekonomi masyarakat di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai kriteria pengelola dan penerima pinjaman, Skim pinjaman, tahapan pemberian pinjaman, pembukuan pinjaman bergulir, monitoring pinjaman, penyelesaian pinjaman yang bermasalah serta pelaporan pinjaman dengan bunga kecil.

10. Apa sumber mata pencaharian masyarakat Desa Gajah sehingga akan diadakannya PNPM Mandiri di Desa Gajah pada waktu itu?

Jawab: Desa Gajah adalah salah satu desa yang terdapat di dalam Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Karena bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak hanya mengandalkan lahan sawah yang menjadi pondasi dalam kehidupannya dan yang bermata pencaharian buruh hanya mengandalkan kerja serabutan yang setiap hari belum tentu ada. Apabila sawah yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu, begitu juga pada masyarakat yang bekerja sebagai buruh, jika tidak ada yang membutuhkan tenaganya maka kebutuhan hidupnya akan terganggu.

11. Adakah pengawasan khusus terkait kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Kalau dalam hal pengawasannya tidak ada, karena setiap bulannya diadakan pertemuan anggota dirumah ketua kelompok, kemudian mengevaluasi apakah ada masalah dalam usahanya, serta mengangsur pinjamannya

12. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PNPM di Desa Gajah ini diantaranya adalah kurangnya dana, karena dana bantuan dari pemerintah jumlahnya terbatas.



## PEDOMAN WAWANCARA

Responden: Ketua kelompok PNPM

### Identitas Diri

Nama : Rohimah  
Asal : Gajah  
Usia : 44 tahun  
Jabatan : Ketua Kelompok

### Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: PNPM Mandiri Desa Gajah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh desa gajah

2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran

3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Ketua PNPM ibu Sundari dan dibantu pemerintah desa dan anggota PNPM

4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?

Jawab: Menurut saya cukup banyak yang bergabung

5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?

Jawab: Ada yang konsisten dan ada yang tidak konsisten

6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: ada yaitu peminjaman dana untuk masyarakat sifatnya gantian atau bergilir

7. Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah yang menonjol apakah berhubungan dengan kegiatan ekonomi?

Jawab: iya tentu, biasanya peminjaman dana itu semestinya digunakan untuk modal usaha

8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: setahu saya, pemerintah desa yang mensosialisasikan kemudian diserahkan kepada kelompok PNPM tapi terkadang ada pelatihannya juga.

9. Bagaimana evaluasi pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: kalau dari pemerintah tidak ada tapi yang ada evaluasi dari kelompok PNPM sendiri yang mana evaluasi juga dilakukan melalui usul dari anggota kelompok terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dipertimbangkan dan diskusikan dibawah bimbingan UPK untuk dicarikan solusi dan inisiatif untuk mengatasi permasalahan sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pengangguran di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak semakin berkurang. Hasil dari pemeriksaan dilaporkan kepada anggota setiap tri wulan dan pada tutup buku akhir tahun

10. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Pasti ada, yaitu terbatasnya bantuan dari pemerintah padahal satu sumber dana itu datang dari pemerintah, namun jumlahnya sangat terbatas. Kemudian proses peminjaman dana yang mana dalam kegiatan PNPM pasti ada dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dan semestinya harus dikembalikan tepat pada waktunya karena dana itu sifatnya bergilir jadi akan pindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Beberapa dari yang dipinjami memiliki kesadaran untuk mengembalikan tapi ada juga yang kurang sadar dan tidak sadar untuk mengembalikannya dengan

berbagai alasan bahkan ada yang sampai kabur atau lari dari tanggung jawabnya. Selanjutnya masalah pelatihan lanjutan yang mana kalau pelatihan berlanjut seperti semangat masyarakat sudah mulai menurun karena berbagai alasan, misalnya malas berangkat dan lebih memilih istirahat atau tidur di rumah

## PEDOMAN WAWANCARA

Responden: Ketua LKMD

### Identitas Diri

Nama : Muhammad Jazuli

Asal : Gajah

Profesi : Pemerintah Desa

Usia : 56 tahun

Jabatan : Ketua LKMD

### Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: setahu saya, PNPM Mandiri Desa Gajah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan secara Mandiri di Desa Gajah biasanya untuk mensejahterakan masyarakat

2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: untuk mensejahterakan masyarakat

3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: dikelola ketua PNPM

4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah??

Jawab: setahu saya, lumayan banyak

5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah??

Jawab: terkait hal ini saya kurang mengetahui

6. Bagaimana perencanaan dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Perencanaan PNPM Mandiri tidak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga

terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

7. Apakah ada tim review untuk memantau PNPM di Desa Gajah?

Jawab: Kegiatan review program Khususnya di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak di mulai dengan dibentuknya tim review pada pengurus PNPM yang dilakukan penguatan sebelumnya terhadap tim tersebut tentang proses yang akan dilakukan

8. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Pasti ada, biasanya terkendala dana

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Responden: Masyarakat yang menjadi anggota PNPM

### **Identitas Diri**

Nama : Astuti  
Asal : Gajah  
Usia : 39 tahun  
Jabatan : Anggota Kelompok

### **Pertanyaan:**

1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: PNPM Mandiri Desa Gajah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh desa gajah tujuannya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran

2. Apa tujuan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran

3. Siapa yang mengelola PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: Ketua PNPM yang akan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan PNPM

4. Apakah banyak masyarakat yang bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?

Jawab: cukup banyak yang bergabung

5. Apakah masyarakat tersebut konsisten untuk terus bergabung dalam PNPM mandiri di Desa gajah?

Jawab: Ada yang konsisten dan ada yang tidak konsisten

6. Apakah ada satu kegiatan yang menonjol dari PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: ada yaitu peminjaman dana tapi harus gantian atau bergilir dan masyarakat harus sabar menunggu gilirannya

7. Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Gajah yang menonjol apakah berhubungan dengan kegiatan ekonomi?

Jawab: iya, peminjaman dana itu umumnya dibuat modal usaha. Jadi Program PNPM Mandiri di Desa Gajah lebih ke arah memberikan bantuan pinjaman bagi pelaku usaha-usaha di Desa Gajah, maka sebagai anggota keterlibatan dalam program ini yaitu ikut serta dari adanya program PNPM yang didalamnya ada pinjaman bergilir bagi pelaku UMKM merasa terbantu untuk dapat mengembangkan usaha

8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: saya kurang mengetahuinya

9. Apakah ada hambatan pemerintah desa dalam merealisasikan PNPM Mandiri di Desa Gajah?

Jawab: ada, kurangnya dana dari pemerintah jadi kalau mau meminjam itu harus sabar menunggu dikarenakan keterbatasan dana jadi ada penerapan sistem bergilir. Kemudian proses pengembalian pinjaman yang kurang lancar yang mana terkait pengembalian pinjaman ada kendala yaitu ada yang tidak punya uang ada juga yang selalu kabur saat ditagih salah-olah tidak mau membayar pinjaman tersebut.

## Lampiran Dokumentasi



**Lokasi Pemerintahan Desa Gajah**



**Proses wawancara dengan anggota PNPM**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kafiya Sitta Salma  
NIM : 1705026046  
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 13 April 1999  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Gajah Kec. Gajah Kab. Demak  
No. HP : 081230491492  
Email : [kafiyasitta@gmail.com](mailto:kafiyasitta@gmail.com)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nama Ayah : Fachrurrozi  
Nama Ibu : Wahyuni  
Alamat : Ds. Gajah Kec. Gajah Kab. Demak  
Pendidikan : TK Kartini Gajah  
SDN Gajah 2  
MTs. Al-Irsyad Gajah  
MA. Al-Irsyad Gajah

Demikian biodata ini saya buat dengan sebestara-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 20 Desember 2021

